

Diantara Digitalisasi dan Ketergantungan Bantuan Sosial: Kemiskinan Perempuan Pesisir di Aceh Barat

Karuni Humairah Arta¹, Ikhsan², Afrizal Tjoetra³, Arfriani Maifizar⁴, Vellayati Hajad⁵,
Ikhwan Rahmatika Latif⁶

^{1,2,3,4,5}Sosiologi, Universitas Teuku Umar, Indonesia

⁶Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Indonesia
umayhumairah1995@gmail.com

Received: 1 July 2026; Revised: 8 July 2026; Accepted: 22 July 2026

Abstrak

Kemiskinan perempuan pesisir merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebiasaan sosial, dan struktur yang mengatur akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis reproduksi kemiskinan perempuan pesisir melalui habitus digital dan arena struktural pemerintah di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan pesisir, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparatur kecamatan, dan relawan Yayasan Abulyatama Indonesia (YAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan perempuan pesisir direproduksi melalui habitus digital yang masih terbatas pada penggunaan telepon genggam untuk komunikasi dan media sosial, sementara pemanfaatan teknologi untuk aktivitas ekonomi masih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan pesisir bergantung pada anak atau keluarga dalam penggunaan teknologi digital. Di sisi lain, arena struktural pemerintah berperan melalui berbagai program bantuan sosial yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Namun, bantuan sosial juga memunculkan kecenderungan ketergantungan akibat rendahnya pendapatan dan terbatasnya peluang kerja. Faktor pendukung pengentasan kemiskinan meliputi bantuan sosial, dukungan keluarga, relasi sosial, dan peluang pemasaran digital. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya pendidikan, keterampilan terbatas, minimnya modal, rendahnya literasi digital, terbatasnya lapangan kerja, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reproduksi kemiskinan perempuan pesisir terjadi melalui interaksi antara habitus digital dan arena struktural pemerintah yang belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi perempuan pesisir.

Kata kunci: kemiskinan perempuan pesisir; habitus digital; arena struktural; reproduksi kemiskinan; modal.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, teknologi, serta berbagai sumber daya yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kemiskinan dipahami sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan, sehingga upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan masih menjadi tantangan yang cukup besar, terutama pada kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang relatif tinggi karena kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam, khususnya sektor perikanan yang dipengaruhi oleh musim, perubahan iklim, dan fluktuasi hasil tangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan rumah tangga nelayan cenderung tidak stabil sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Dalam situasi demikian, perempuan pesisir memegang peran penting tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi melalui aktivitas pengolahan hasil perikanan, perdagangan skala kecil, maupun berbagai pekerjaan informal lainnya. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga pesisir.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir masih menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Awalia et al. (2023) menjelaskan bahwa perempuan pesisir di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat, terjebak dalam perangkap kemiskinan akibat keterbatasan akumulasi modal produktif, lemahnya jaringan sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta dominasi pemilik modal. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat turut memperkuat kerentanan ekonomi perempuan pesisir. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh struktur sosial yang membatasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang ekonomi.

Penelitian lain menegaskan bahwa perempuan pesisir memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Indrawasih dan Pradipta (2021)

menemukan bahwa perempuan nelayan di Kabupaten Demak membangun pergerakan sosial untuk memperoleh pengakuan atas hak-haknya sebagai nelayan perempuan sehingga dapat mengakses berbagai program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan. Sejalan dengan itu, Hamzah (2019) menunjukkan bahwa pelatihan industri rumah tangga mampu meningkatkan keterampilan, membuka peluang usaha baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan miskin pesisir. Syahputra dan Taufiq (2021) serta Juliyan (2022) juga menunjukkan bahwa perempuan pesisir memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga melalui berbagai aktivitas ekonomi produktif, meskipun kontribusi tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kerentanan ekonomi keluarga nelayan.

Penelitian lain juga menyoroti pentingnya strategi bertahan hidup dan pemberdayaan perempuan pesisir dalam menghadapi kemiskinan. Karlita dan Pandjaitan (2017) menemukan bahwa perempuan nelayan mengembangkan berbagai strategi sosial dan ekonomi untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, sedangkan Susilowati dan Mafruhah (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan pesisir dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan kelembagaan dengan pemerintah sebagai aktor yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi dalam proses pemberdayaan. Kajian literatur yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wahyuni (2025) juga memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan penguatan kelembagaan mampu meningkatkan diversifikasi ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan norma gender yang kuat. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru bagi perempuan untuk memperluas akses terhadap informasi, pemasaran produk, layanan keuangan, dan jejaring usaha. Wulandari dan Kassim (2025) menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan digital melalui lembaga keuangan mikro berkontribusi terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan. Nurhayati et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pelatihan pemasaran digital dan kewirausahaan sosial berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan kapasitas usaha kelompok perempuan pesisir. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi digital berpotensi menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh peningkatan kapasitas individu dan lingkungan kelembagaan yang memadai.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada peran ekonomi perempuan, strategi bertahan hidup, pemberdayaan, atau efektivitas program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian

mengenai transformasi digital juga cenderung menempatkan teknologi sebagai instrumen pemberdayaan tanpa menjelaskan bagaimana praktik penggunaan teknologi dibentuk oleh pengalaman sosial, kepemilikan modal, dan struktur yang mengatur akses terhadap sumber daya. Dengan kata lain, hubungan antara praktik digital sehari-hari perempuan pesisir dengan struktur sosial yang melingkupinya masih belum banyak dikaji. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kemiskinan perempuan pesisir tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu (2002), penelitian ini memandang bahwa praktik tersebut terbentuk melalui interaksi antara habitus digital, berbagai bentuk modal (ekonomi, sosial, dan budaya), serta arena struktural pemerintah yang mengatur distribusi sumber daya dan peluang. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mengapa perempuan pesisir tetap berada dalam kondisi miskin, tetapi juga mengungkap mekanisme sosial yang menyebabkan kemiskinan terus bertahan meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan dan peluang digital telah tersedia

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan konsep habitus digital dan arena struktural pemerintah dalam menjelaskan persistensi kemiskinan perempuan pesisir. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekonomi, pemberdayaan, atau teknologi secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik digital, kepemilikan modal, dan struktur kebijakan saling berinteraksi dalam membentuk peluang maupun hambatan bagi perempuan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana habitus digital dan arena struktural pemerintah memengaruhi persistensi kemiskinan perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana habitus digital dan arena struktural pemerintah memengaruhi persistensi kemiskinan perempuan pesisir. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, praktik sosial, serta makna yang dibangun oleh perempuan pesisir dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital dan mengakses berbagai program pengentasan kemiskinan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Wilayah ini dipilih secara purposive karena merupakan salah satu kawasan pesisir yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan dan masih menghadapi berbagai permasalahan sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan serta keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan teknologi digital. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama terdiri atas perempuan pesisir yang berasal dari rumah tangga miskin dan menerima program bantuan sosial pemerintah. Untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif, penelitian juga melibatkan informan pendukung yang terdiri atas aparatur Kecamatan Samatiga, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta relawan Yayasan Abulyatama Indonesia (YAI) yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman informan mengenai kondisi sosial-ekonomi, penggunaan teknologi digital, akses terhadap program pemerintah, serta strategi bertahan hidup dalam menghadapi kemiskinan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas ekonomi perempuan pesisir, pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, serta interaksi mereka dengan lingkungan sosial dan kelembagaan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi dokumen kebijakan, data statistik, laporan program pemberdayaan, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari perempuan pesisir, aparatur pemerintah, pendamping PKH, dan relawan YAI. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang lebih valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus digital, modal (ekonomi, sosial, dan budaya), serta arena struktural pemerintah untuk menjelaskan mekanisme yang membentuk persistensi kemiskinan perempuan pesisir.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Pesisir di Kecamatan Samatiga

Perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga memiliki peran yang cukup penting dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Selain menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas produktif, seperti mengolah hasil perikanan, menjual ikan, membuka usaha kecil, serta bekerja sebagai buruh harian ketika hasil tangkapan nelayan menurun. Meskipun demikian, sebagian besar aktivitas ekonomi tersebut masih bersifat informal dengan pendapatan yang relatif rendah dan tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan belum memiliki keterampilan kerja yang memadai. Kondisi tersebut membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak di luar sektor perikanan. Selain itu, ketergantungan terhadap pendapatan suami yang bekerja sebagai nelayan menyebabkan kondisi ekonomi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan dan kondisi cuaca. Ketika hasil tangkapan menurun, pendapatan keluarga ikut berkurang sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditopang melalui bantuan sosial pemerintah maupun pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh perempuan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Awalia et al. (2023) yang menjelaskan bahwa kemiskinan perempuan pesisir tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kepemilikan modal ekonomi, lemahnya jaringan sosial, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Karlita dan Pandjaitan (2017), yang menunjukkan bahwa perempuan pesisir mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kemiskinan perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

3.2 Habitus Digital Perempuan Pesisir dalam Kehidupan Sehari-hari

Perkembangan teknologi digital telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga. Sebagian besar informan telah memiliki telepon pintar dan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital masih didominasi untuk aktivitas komunikasi, seperti menggunakan WhatsApp, Facebook, TikTok, dan YouTube. Pemanfaatan teknologi tersebut

lebih banyak diarahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengikuti perkembangan informasi, atau mencari hiburan dibandingkan untuk kegiatan ekonomi. Sebagian besar perempuan pesisir belum memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran produk, pengembangan usaha, maupun akses terhadap layanan keuangan digital. Bahkan beberapa informan mengaku masih meminta bantuan anak atau anggota keluarga ketika harus menggunakan aplikasi tertentu atau mengakses layanan digital pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat digital belum diikuti oleh kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut mencerminkan terbentuknya habitus digital yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial. Habitus digital perempuan pesisir masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunikasi sehingga belum berkembang menjadi praktik ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah. Rendahnya literasi digital sebagai bagian dari modal budaya menyebabkan peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Wulandari dan Kassim (2025) yang menyatakan bahwa akses terhadap teknologi digital belum secara otomatis meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas dan literasi digital. Demikian pula Nurhayati et al. (2026) menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital mampu meningkatkan kapasitas perempuan pesisir apabila dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi pada kepemilikan teknologi, melainkan pada kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut sebagai modal ekonomi.

3.3 Arena Struktural Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Di Kecamatan Samatiga, sebagian besar informan merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta beberapa bentuk bantuan sosial lainnya. Program tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama ketika pendapatan keluarga menurun akibat hasil tangkapan ikan yang tidak menentu. Selain pemerintah, Yayasan Abulyatama Indonesia (YAI) juga berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan. Kehadiran pemerintah dan organisasi masyarakat menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi berbagai aktor, bukan hanya pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi masih berorientasi pada bantuan konsumtif. Program yang secara khusus mendorong peningkatan literasi digital, pengembangan usaha berbasis teknologi, maupun pendampingan kewirausahaan masih relatif terbatas. Akibatnya, perempuan pesisir cenderung menjadi penerima manfaat program dibandingkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi digital. Dalam perspektif digital governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup diwujudkan melalui digitalisasi layanan pemerintah, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan Susilowati dan Mafruhah (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan pesisir dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga pendukung. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas digital masyarakat sehingga bantuan sosial dapat berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Persistensi Kemiskinan Perempuan Pesisir

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan perempuan pesisir. Dukungan keluarga menjadi faktor yang paling dominan karena memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi di tengah keterbatasan pendapatan rumah tangga. Selain itu, hubungan sosial yang baik di lingkungan masyarakat, keberadaan bantuan sosial pemerintah, serta peluang pemasaran melalui media digital juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan kerja yang terbatas, minimnya modal usaha, rendahnya literasi digital, serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi kendala utama yang dihadapi perempuan pesisir. Ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya terdorong untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa persistensi kemiskinan perempuan pesisir merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan faktor struktural. Keterbatasan modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya menyebabkan perempuan belum mampu memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia, termasuk peluang yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan perlu mengintegrasikan peningkatan literasi digital, penguatan keterampilan kewirausahaan, akses terhadap permodalan, dan pendampingan yang

berkelanjutan sehingga perempuan pesisir mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital sekaligus meningkatkan kemandirian ekonominya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persistensi kemiskinan perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh interaksi antara habitus digital, kepemilikan modal, dan arena struktural pemerintah. Meskipun sebagian besar perempuan pesisir telah memiliki akses terhadap teknologi digital, pemanfaatannya masih terbatas pada aktivitas komunikasi dan media sosial sehingga belum mampu mendukung peningkatan pendapatan maupun kemandirian ekonomi. Di sisi lain, berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun belum sepenuhnya mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas digital.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, minimnya modal usaha, rendahnya literasi digital, serta terbatasnya kesempatan kerja menjadi faktor utama yang menghambat pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, dukungan keluarga, jaringan sosial, bantuan pemerintah, serta peluang pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor yang berpotensi memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan perempuan pesisir apabila didukung oleh program pemberdayaan yang tepat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan digital governance tidak cukup berfokus pada penyediaan layanan digital atau penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi instrumen yang lebih inklusif dalam mendukung pemberdayaan perempuan pesisir dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan, khususnya perempuan pesisir di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Samatiga, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, dan Yayasan Abulyatama Indonesia (YAI) atas dukungan, kerja sama, serta informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

Awalia, H., Hamdi, S., & Nasrullah, A. (2023). Perangkap kemiskinan pada perempuan pesisir Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(2), 128–151.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.

Hamzah, N. (2019). Pemberdayaan perempuan miskin pesisir melalui penguatan industri kecil rumah tangga (Studi pada perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat). *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 50–62.

Indrawasih, R., & Pradipta, L. (2021). Pergerakan sosial perempuan pesisir dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 105–117.

Juliyani, E. (2022). Peran perempuan dalam perekonomian keluarga nelayan di pesisir utara Kabupaten Lamongan. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(2), 24–30.

Karlita, N., & Pandjaitan, N. K. (2017). Strategi bertahan hidup perempuan di daerah pesisir. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 1(3), 287–298.

Kurniawan, R., & Wahyuni, S. (2025). Literatur review: Pengembangan kapasitas perempuan pesisir dalam diversifikasi ekonomi lokal. *South East Asian Management Concern*, 2(2), 64–70.

Laberge, S., & Kay, J. (2002). Pierre Bourdieu's sociocultural theory and sport practice. *Theory, sport and society*, 10, 239-266.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nurhayati, N., Ramadhan, F., & Permata, I. (2026). Dari tepi pantai ke pasar: Penguatan kewirausahaan sosial berbasis kearifan lokal pada kelompok perempuan pesisir di kawasan Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. *PROGRESIA: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 94–106.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.

Sudarso, S., Keban, P. E., & Mas'udah, S. (2019). Poverty, lack of awareness of gender education, and patriarchy among Javanese coastal women. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (21), 1137–1157.

Susilowati, I., & Mafruhah, I. (2023). Women's empowerment to alleviate poverty in coastal zones: A case study of fisherwomen in Pacitan, Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 165–179.

Syahputra, A., & Taufiq, T. (2021). Ekonomi perempuan pesisir Gampong Ujong Blang. *Saree: Research in Gender Studies*, 3(1), 1–22.

United Nations. (2023). *E-Government Survey 2023: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development*. United Nations.

Wulandari, P., & Kassim, S. H. (2025). Empowering female entrepreneurs through access to digital microfinance services. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 17(2), 245–261.